

Konstruksi Mahasiswi Tentang Politik Uang Dalam Pilkades

Putri Cahya Sufiyah¹, Anata Reyustina Almaidah², Fransiscus Xaverius Sri Sadewo³, Mochamad Arif Afandi⁴

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Email: putricahya.21051@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Dalam kegiatan bernegara yang dilakukan tidak akan lepas dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh seorang oknum atau sekelompok oknum yang memiliki kekuasaan. Terdapat tiga tipe fenomena yang termasuk kedalam tindakan korupsi, yaitu pemerasan, penyuapan, dan nepotisme. Salah satu fenomena korupsi yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah praktik jual beli suara atau yang biasa disebut dengan politik uang. Praktik politik uang ini sangat rawan terjadi saat dilaksanakannya pemilihan kepala desa. Berdasarkan pemaparan mengenai fenomena tersebut, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realitas yang dibangun oleh mahasiswi sebagai kaum terpelajar ketika melihat praktik politik uang yang terjadi. Adapun teori yang digunakan adalah teori konstruksi milik Peter L. Berger. Untuk data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi non partisipandan wawancara terstruktur, sedangkan untuk data sekunder dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap eksternalisasi, semua narasumber menyampaikan gagasannya sesuai dengan pengalamannya masing-masing sehingga muncul sebuah kesadaran bersama tentang politik uang dalam pilkades. Selanjutnya obyektivasi bisa dilihat melalui para kader atau orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin akan berkeliling desa dan berkunjung ke rumah warga. Pada tahap akhir yakni internalisasi, sebagian narasumber akan memilih calon yang paling banyak memberikannya uang.

Kata Kunci: Konstruksi, Mahasiswi, Politik Uang, Pilkades

Abstract

In state activities carried out will not be separated from acts of corruption committed by an individual or a group of persons who have power. There are three types of phenomena that are included in acts of corruption, namely extortion, bribery, and nepotism. One of the most common corruption phenomena in society is the practice of buying and selling votes or what is commonly known as money politics. The practice of money politics is very prone to occur when village head elections are held. Based on the explanation of this phenomenon, the purpose of conducting this research is to find out how the reality is built by female students as educated people when they see the practice of money politics that occurs. The theory used is Peter L.

Beger's construction theory. The primary data used in this research was collected through non-participant observation techniques and structured interviews, while the secondary data was collected through library research techniques. This research shows that in the externalization stage, all resource persons conveyed their ideas according to their respective experiences so that a shared awareness emerged about money politics in the pilkades. Furthermore, objectivation can be seen through the cadres or people who nominate themselves as leaders who will tour the village and visit residents' homes. In the final stage, namely internalization, some sources will choose the candidate who gives them the most money.

Keywords: Construction, Student, Money Politics, Pilkades

Pendahuluan

Dalam kehidupan bernegara tentu tidak lepas dari adanya tindak korupsi. Tindak korupsi merupakan suatu tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang dalam menyalahgunakan keuangan negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Alatas (1975) terdapat tiga tipe fenomena yang termasuk kedalam tindakan korupsi, yaitu pemerasan, penyuapan, dan nepotisme (Alatas 1981). Sejak adanya masa reformasi tindak korupsi tidak lagi terpusat pada para eksekutif, tetapi menyebar ke setiap bidang kehidupan dikarenakan adanya desentralisasi pemerintahan. Adanya desentralisasi ini membuat para pemerintah yang ada di tingkat daerah dapat melakukan tindak korupsi sebab kekuasaan sepenuhnya berada di tangan mereka sehingga terkadang peraturan yang dibuat pun rawan dan cenderung tidak ketat. Segala tindakan korupsi yang ada ini diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang dimana dalam undang-undang tersebut terdapat 13 pasal dan merumuskan tiga puluh jenis korupsi dengan tingkat hukuman yang berbeda-beda pula berdasarkan jenis tindakan korupsi yang dilakukan (Anon n.d.).

Terjadinya tindakan korupsi bisa disebabkan oleh adanya kegiatan jual beli suara pemilih atau politik uang. Politik uang merupakan salah satu usaha yang dilakukan orang untuk menanamkan pengaruhnya kepada individu lain dengan cara memberikan sebuah imbalan tertentu. Pada dasarnya praktek *money politic* mampu menciptakan sosok pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kelompok. Ketika seorang kandidat terpilih dengan proses suap menyuap maka dirinya akan langsung menyusun strategi agar modal yang telah dikeluarkannya itu dapat kembali seperti semula. Biasanya perilaku menyuap masyarakat sering dijumpai saat mendekati acara pemilihan (Pahlevi and Amrullobbi 2020).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini diantaranya adalah yang pertama berjudul Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan suatu temuan bahwa tindakan masyarakat Desa Kedungjati menerima politik uang didasari oleh tindakan rasional tujuan. Masyarakat di desa tersebut masih menganggap politik uang sebagai suatu tradisi yang lumrah dilakukan. Masyarakat Desa Kedungjati akan datang ke TPS dengan membawa uang saku atau uang pemberian dari calon. Politik uang dilakukan karena masih adanya anggapan dari masyarakat bahwa menolak rejeki bukanlah hal yang baik. Sejak awal masyarakat telah mengetahui adanya motif dan tujuan dari calon.

Namun di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang sudah memiliki kriteria calon sendiri tanpa paksaan dari politik uang yang diberikan (Putri et al. 2020).

Selanjutnya penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Nur Amilia Kartika Rahmi dan Eka Vidya Putra dengan judul Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang digambarkan sebagai kondisi dimana antara pemberi dan penerima berusaha untuk meraih suatu tujuan. Selain itu, pemaknaan politik uang dalam masyarakat Desa Ladang Panjang mengalami perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi karena pengetahuan masyarakat setempat yang masih sangat terbatas (Rahmi and Putra 2022).

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut antara lain : pertama, acuan teori. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memakai teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan penelitian terdahulu menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz. Kedua, subyek penelitian. Penelitian sebelumnya memilih warga desa baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek penelitiannya. Sedangkan, dalam penelitian ini menetapkan mahasiswi sebagai subyeknya. Ketiga, fokus penelitian. Penelitian yang berjudul "Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa" mempunyai fokus terhadap faktor pendorong, pelaksanaan, serta dampak dari adanya praktik *money politic* (politik uang) sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi mahasiswi tentang politik uang dalam pilkades.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi non partisipan dan wawancara terstruktur. Untuk subjek dalam penelitian ini sendiri terdiri dari enam orang yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, dengan kriteria tertentu yaitu mahasiswi yang berasal dari daerah pedesaan serta pernah ikut dalam pilkades ataupun menyaksikan pilkades secara langsung. Untuk data sekunder sendiri berasal dari jurnal yang sudah terpublikasi secara nasional maupun internasional, buku, maupun dokumen lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori konstruksi milik Peter L. Berger. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa realitas tidak dapat dipisahkan dari adanya pengetahuan. Realitas yang mengelilingi individu itu merupakan suatu pengetahuan. Sedangkan, pengetahuan itu suatu kepastian yang mengungkap bahwa fenomena adalah suatu hal nyata dan memiliki karakteristik. Dalam rangka membangun aktivitas, realitas yang dialami oleh seseorang pada kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari proses interaksi dengan manusia lain. Realitas inilah yang juga membuat individu memberikan realitas lain (Siyoto and Sodik 2015).

Temuan dan Analisis

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Masyarakat Desa

Kondisi sosial ekonomi merupakan suatu situasi yang menempatkan seseorang pada tingkat kedudukan tertentu dalam sistem kehidupan masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi ini berkaitan erat dengan komunitas, kepemilikan barang, dan pendidikan seseorang (Basrowi dan Juariyah 2010). Dalam penelitian ini dijumpai berbagai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda dikarenakan subjek dari penelitian ini berasal dari berbagai desa yang ada. Subjek pertama yaitu ED menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi di desanya terbilang cukup bagus karena kemudahan akses pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana publik lainnya. Selain itu, masyarakat desa juga banyak yang bergantung pada sektor industri pabrik dengan menjadi karyawan maupun membuka wirausaha kecil. Untuk kondisi politik sendiri subjek menilai bahwa sudah berjalan semestinya dan juga dilakukan secara demokratis.

Kondisi desa pada subjek kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam juga hampir mirip dengan kondisi desa asal dari subjek pertama. Subjek kedua (AS) juga menyatakan bahwa pemerintahan di desanya berjalan dengan semestinya, dimana perangkat desa yang ada sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat apabila terdapat masalah atau kendala yang dihadapi oleh warganya. Sedangkan subjek ketiga (SA) menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi di desanya tergolong menengah dengan mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian atau usaha lainnya seperti membuka usaha selep serta bekerja pada pabrik yang ada di sekitar desa. Selanjutnya subjek keempat (HW) mengungkapkan jika desanya dalam bidang perekonomian itu cukup terpenuhi dan hubungan antar masyarakatnya juga sangat akurat. Berikutnya subjek kelima (DN) pun menerangkan hal serupa dimana kondisi sosial, ekonomi, politik desa tempat tinggalnya sedang berada pada kondisi baik-baik saja. Adapun subjek terakhir (PS) mengatakan apabila masyarakat desanya masuk klasifikasi masyarakat agraris dan keadaan pemerintahan desa cenderung stabil.

Pengalaman Menerima Politik Uang

Kebanyakan subjek dalam penelitian ini tidak pernah menerima politik uang, tetapi yang menerima adalah orang yang berada di sekitarnya seperti teman maupun keluarganya. Subjek pertama menyatakan bahwa ibunya pernah menerima politik uang. Akan tetapi, ibunya tetap memilih calon yang sesuai dengan kehendaknya dan bukan berdasarkan kepada siapa yang memberikan uang. Politik uang yang diterima oleh ibunya tersebut biasanya tidak akan dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga tapi disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan.

Subjek kedua juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima politik uang, tetapi temannya yang berbeda desa pernah menerima politik uang. Dari politik uang yang didapatkannya tersebut kemudian membuat teman dari subjek kedua memutuskan untuk memilih calon kepala desa yang memberikannya uang tersebut. Sedangkan subjek ketiga menyatakan bahwa dirinya beserta keluarga intinya tidak pernah menerima politik uang karena menganggap bahwa hal tersebut tidak seharusnya dilakukan dan melanggar nilai agama. Selanjutnya subjek keempat menerangkan apabila dirinya pada zaman dahulu itu mempunyai pemahaman politik yang masih terbatas dan sangat polos sehingga tidak pernah menerima politik uang.

Adapun subjek kelima dan keenam menuturkan jika dirinya sudah pernah menerima politik uang. Mereka menjelaskan apabila sebelum berlangsungnya

pilkades biasanya para kader atau orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin akan berkeliling desa dan berkunjung ke rumah warga setempat untuk menjalin silaturahmi. Akan tetapi, peristiwa demikian juga diselingi dengan maksud tertentu yakni mencari dukungan suara sehingga muncul kegiatan suap menyuap.

Konstruksi Mahasiswi Tentang Politik Uang

Politik uang yang ada di sekitar mahasiswi telah membentuk suatu realitas dalam diri mengenai adanya fenomena ini. Mahasiswi sebagai kaum intelektual dalam masyarakat melihat adanya politik uang yang ada disekitarnya bukan hanya sebagai fenomena yang lumrah terjadi dalam masyarakat pedesaan tetapi juga memiliki pandangan tersendiri dari pengetahuan yang dimiliki dan dipelajari. Pengetahuan yang ada inilah membentuk realitas dalam diri mahasiswi tentang politik uang. Subjek pertama (ED) menilai bahwa politik uang yang dilakukan dalam pilkades ini memang sudah seperti budaya lama yang sangat melekat dalam masyarakat. Menurutnya budaya seperti ini bukanlah sesuatu yang tepat untuk dilakukan karena seharusnya pemimpin dipilih berdasarkan pada kemampuan serta integritas yang dimiliki. Dalam kehidupan masyarakat juga menurutnya juga masih banyak orang yang terpengaruh dengan adanya politik uang dengan memilih calon yang paling banyak memberikannya uang tetapi ada juga yang tidak terpengaruh sehingga akan tetap memilih sesuai dengan isi hatinya. Pemilihan pemimpin ini harus diperhatikan dan tidak sembarangan karena dapat menyebabkan kemunduran pada desa yang dipimpin. Subjek juga memberi contoh nyata bahwa kepala desanya yang terdahulu pernah melakukan politik uang ternyata ketika menjabat melakukan korupsi dan bertindak sewenang-wenang.

Subjek kedua yaitu AS menyatakan bahwa tidak setuju dengan adanya politik uang seperti halnya dengan subjek pertama. Menurutnya pandangannya pilkades harus dilakukan secara jujur dengan melihat visi dan misi dari calon. Seperti halnya subjek pertama, AS juga menyatakan bahwa calon yang terpilih dari hasil politik uang akan berdampak langsung ke kegiatan desa karena sebenarnya calon yang terpilih tersebut tidak cocok untuk menjadi kepala desa yang baru.

Pandangan mengenai ketidaksetujuan terjadinya politik uang juga dilontarkan oleh subjek ketiga (SA). Menurutnya jika memang memiliki niat dan tujuan yang baik sebagai kepala desa seharusnya tidak melakukan politik uang. Dalam politik uang yang dilakukan ini target utama dari calon adalah masyarakat kecil yang dianggap tidak berdaya dan mudah untuk dimanipulasi karena kurangnya pengetahuan dan kebutuhan ekonomi yang dimiliki. Masyarakat yang memilih harusnya berlandaskan pada asas *luber jurdil* dalam memilih calon yang ada. Dengan tindakan politik uang yang dilakukan oleh calon kepala desa, masyarakat dapat menilai apakah calon tersebut memang layak untuk menjabat sebagai kepala desa atau mengingat langkah awal dalam menjabat dilakukan dengan cara yang tidak baik dan kotor.

Selanjutnya subjek keempat (HW) menyatakan tidak setuju dengan adanya politik uang. Dirinya beranggapan bahwa praktik *money politic* itu bisa merusak integritas demokrasi dan juga prinsip pemilihan yang adil. Hal tersebut tentu saja mampu mendorong munculnya ketidaksetaraan dalam kompetensi politik. Selain

itu, politik uang dipandang dapat mengorbankan kepentingan publik karena pejabat yang terpilih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada masyarakat luas. Adapun subjek kelima (DN) dan keenam (PS) menyampaikan apabila politik uang seharusnya tidak boleh dilakukan karena budaya KKN itu seharusnya dihilangkan bukan dilanggengkan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemikiran Peter L. Berger ditemukan proses dialektik yang terbagi menjadi tiga tahapan antara lain: pertama, eksternalisasi. Kedua, obyektivasi. Ketiga, internalisasi. Pada tahap eksternalisasi, semua narasumber menyampaikan gagasannya sesuai dengan pengalamannya masing-masing sehingga muncul sebuah kesadaran bersama tentang politik uang dalam pilkades. Selanjutnya obyektivasi bisa dilihat melalui para kader atau orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin akan berkeliling desa dan berkunjung ke rumah warga. Pada tahap akhir yakni internalisasi, sebagian narasumber akan memilih calon yang paling banyak memberikannya uang.

Daftar Pustaka

- Alatas, Syed Hussein. 1981. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer (Terjemahan)*. Jakarta: LP3ES.
- Anon. n.d. "UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [JDIH BPK RI]." Retrieved April 9, 2023 (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>).
- Basrowi dan Juariyah, Siti. 2010. "Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, April 2010." *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 7(April):58-81. doi: <https://doi.org/10.21831/jep.v7i1.577>.
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrurrobi. 2020. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6(1):141-52.
- Putri, Magda Ilona Dwi, Nahdia Arifani, Dela Ratnasari, Aurelia Vidiara Auliavia, and Sinta Nuriyah. 2020. "Politik Dan Tradisi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa." *JURNAL ISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN POLITIK* 17(2). doi: <http://dx.doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>.
- Rahmi, Nur Amilia Kartika, and Eka Vidya Putra. 2022. "Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa." *Jurnal Perspektif* 5(3):423-31. doi: [10.24036/perspektif.v5i3.642](https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.642).
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. 2015. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Vol. 7.